



## INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA PEKALONGAN **2019**

Nomor Katalog : 4102004.3375

Catalog Number

ISBN : 978-602-6415-58-5

Nomor Publikasi : 33750.2017

Publication Number

Ukuran Buku/Book Size : 8,5 inc x 11 inc

Jumlah Halaman/ Total Pages : xii + 60 halaman

Naskah/ Manuscript

Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan/ BPS – Statistics of Pekalongan Municipality

Gambar Kulit/ Cover Design

**Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan**/ BPS – Statistics of Pekalongan Municipality

**Diterbitkan oleh**/ Published by :

© Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan

BPS – Statistics of Pekalongan Municipality

**Dicetak oleh/** Printed by

Vertikal Grafika (Cetakan I/ 1<sup>st</sup> Printed: Desember/ December 2020)

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part or all of this book for commercial purpose without permission from BPS-Statistics Indonesia

## (TIM PENYUSUN)

Penanggung Jawab Umum: Rahyudin

> Penyusun: Diah Tri Pujiastuti

Gambar Kulit: Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

> Tata Letak: Diah Tri Pujiastuti

> > Penyunting: Rahyudin Misbah

(KATA PENGANTAR)

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Pekalongan 2019 merupakan salah satu

publikasi yang menyajikan gambaran keadaan dan tingkat perkembangan kesejahteraan

rakyat/masyarakat Kota Pekalongan. Oleh karena itu, data yang disajikan dalam publikasi ini

dapat dipergunakan sebagai salah satu informasi dan referensi untuk evaluasi hasil pembangunan

sosial ekonomi masyarakat, dan perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa

mendatang oleh Pemerintah.

Disadari bahwa istilah kesejahteraan sebenarnya mencakup bidang-bidang kehidupan yang

sangat luas yang tidak semua aspeknya dapat diukur. Isi dari publikasi ini hanya mencakup pada

aspek-aspek yang dapat diukur dan tersedia datanya. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan

taraf kesejahteraan yang luas itu disajikan dengan table-tabel sesuai dengan data yang tersedia

yang menjadi acuan dalam upaya penyusunan publikasi ini.

Kepada semua pihak, terutama masyarakat Kota Pekalongan yang telah meluangkan

waktunya menjadi responden, dan berbagai pihak yang telah berpartisipasi sampai dengan

terbitnya publikasi ini, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Tentu tak ada gading yang tak retak, maka saran dan kritik untuk penyempurnaan publikasi ini

sangat diharapkan. Akhirul kata, semoga upaya ini bermanfaat.

Pekalongan, Desember 2020

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PEKALONGAN,

Rahyudin

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Pekalongan 2019

V

# (DAFTARISI)

		Halaman
KATA PEN	IGANTAR	v
	SI	vii
DAFTAR T	SABEL	ix
BAB I.	PENDAHULUAN	3
	1.1. Ruang Lingkup	3
	1.2. Maksud dan Tujuan	4
	1.3. Sistematika Penyajian	4
	1.4. Sumber Data.	5
BAB II.	KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	9
	2.1. Pertumbuhan dan Sebaran Penduduk	9
	2.2. kepadatan penduduk per kecamatan	10
	2.3.Penduduk menurut kelompik umur dan <i>dependecy ratio</i>	11
	2.4. Perkawinan.	12
	2.5. Child Woman Rate	13
BAB III.	PENDIDIKAN	17
	3.1. Sarana dan Prasarana Sekolah	17
	3.2. Angka Partisipasi Sekolah	18
	3.3. Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan	22
BAB IV.	KESEHATAN	29
	4.1. Pelayanan Kesehatan	29
	4.2. Morbiditas	30
	4.3 Aseptor KB.	31
BAB V.	KETENAGAKERJAAN	37
	5.1. Penduduk Usia Kerja	37
	5.2. Angkatan Kerja	39
	5.3. Tingkat Pengangguran Terbuka	40
	5.4. Penduduk Yang Bekerja	41
BAB VI.	PERUMAHAN	45
	6.1. Penguasaan Tempat Tinggal	45
	6.2. Luas Lantai	46
	6.3. Sumber Air Minum	47
BAB VII.	INDIKATOR LAINNYA	53
· · · · · · · · · · · · · · · · ·	7.1. Pengeluaran Rumah Tangga dan Tempat Ibadah	53
BAB VIII.	PENUTUP	59

# (DAFTAR TABEL)

Tabel 2.1.	Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan	Halaman	
	Tahun 2017-2019	g	9
Tabel 2.2	Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan Menurut Kecamatan Tahun 2017-2019		10
Tabel 2.3.	Penduduk Kota Pekalongan Menurut Kelompok Umur dan		
1 auei 2.3.	Dependency Ratio Tahun 2017-2019	1	11
Tabel 2.4.	Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Status Perkawinan		
14001 2	Kota Pekalongan tahun 2017-2019	Í	13
Tabel 2.5.	Child Woman Rate (CWR) di Kota Pekalongan Tahun 2017-2019	-	14
Tabel 3.1.	Rasio Antara Murid Terhadap Sekolah dan Guru di Kota Pekalongan Mer Jenjang Pendidikan Tahun 2017-2019		17
Tabel 3.2.	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Umur Kota Pekalongan Tahun 2017-2019		19
Tabel 3.3.	Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2017-2019	2	20
Tabel 3.4	Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Ya Ditamatkan di Kota Pekalongan Tahun 2017-2019		23
Tabel 3.5.	Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Penduduk Kota Pekalongan 2017 – 2019.		24

Tabel 4.1.	Banyaknya Tenaga dan Tempat Pelayanan Kesehatan di Kota Pekalongan Tahun 2017-2019	29
Tabel 4.2.	Angka Kesakitan di Kota Pekalongan Tahun 2017-2019	31
Tabel 4.3.	Persentase Perempuan Usia 15-49 Tahun Berstatus Kawin Menurut Pemakaian Alat KB Tahun 2017-2019	32
Tabel 4.4.	Persentase Akseptor KB Menurut Kontrasepsi Yang Sedang Digunakan di Kota Pekalongan 2017-2019	33
Tabel 5.1.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Utama Tahun 2017-2019	38
Tabel 5.2.	TPAK dan TPT Kota Pekalongan Tahun 2017-2019	39
Tabel 5.3.	Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama Tahun 2017-2019	41
Tabel 6.1.	Persentase Rumahtangga Menurut Penguasaan Bangunan Tahun 2017-2019	46
Tabel 6.2.	Persentase Rumahtangga Menurut Luas Lantai Tahun 2017-2019	47
Tabel 6.3.	Persentase Rumahtangga Menurut Sumber Air Minum Tahun 2017-2019	48
Tabel 6.4.	Persentase Rumahtangga Menurut Jarak Sumber Air Minum ke Penampungan Tinja Tahun 2017-2019	49
Tabel 7.1	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran Tahun 2019	54

# Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Pekalongan

2019

## RATA-RATA LAMA SEKOLAH

#### **8,71 tahun**

Seorang anak hanya mampu menempuh pendidikan selama 8-9 tahun, atau setara dengan kelas 2 (dua) Sekolah Menengah Pertama (SMP)

# TINGKAT S PENGANGGURAN TERBUKA

### 5.77 persen

Penduduk usia kerja yang tidak terserap dalam pasar kerja di Kota Pekalongan ada sebanyak 5,77 persen

TINGKAT
PARTISIPASI
ANGKATAN
KERJA

#### 72,32persen

Persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Kota Pekalongan sebanyak 72,32 persen

# BABI PENDAHULUAN

#### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1. Ruang Lingkup

Upaya pembangunan pada berbagai bidang yang menyeluruh dan menyentuh seluruh wilayah, dilakukan dengan menggunakan segala sumber daya yang tersedia. Untuk meletakan landasan yang kuat agar pembangunan dapat lebih terarah, lancar, efektif dan efisien, maka sangat penting dilakukan adalah proses perencanaan, yang didasari dengan data dan informasi yang valid, akurat dan relevan untuk setiap tahap dan komponennya. Proses pembangunan semacam ini merupakan suatu usaha jangka panjang yang tidak serta merta dapat dirasakan hasilnya oleh segenap lapisan masyarakat. Data yang diperlukan dengan sendirinya haruslah mempunyai beberapa persyaratan, diantaranya yaitu yang sangat berkaitan dengan tujuan pembangunan itu sendiri, yang mampu mencerminkan hal-hal yang benar dalam usaha mewujudkan tujuan pembangunan. Inti tujuan pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat, untuk itulah maka diperlukan informasi dan data yang memadai mengenai hal tersebut, sehingga arah pembangunan dapat diwujudkan dan tepat sasaran.

Aspek-aspek kehidupan seluruh rakyat meliputi pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan sosial budaya, terus menerus diperhatikan dan ditingkatkan pelayanannya, namun demikian, masalah kependudukan seperti tingginya laju pertumbuhan penduduk, persebaran penduduk yang tidak merata di setiap wilayah, dan struktur umur penduduk yang relatif masih muda, dapat menjadi faktor penghambat upaya pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya, upaya pembangunan diprioritaskan pada pembangunan yang menyangkut kebutuhan hidup rakyat banyak.

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Pekalongan Tahun 2019, merupakan kumpulan berbagai macam data dan informasi yang dipilih untuk memberikan gambaran

tentang perkembangan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan, yaitu berupa indikator kependudukan, keluarga berencana, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, daya beli yang diukur berupa pengeluaran masyarakat, dan bangunan peribadatan. Keadaan sosial masyarakat yang begitu komplek dan multi dimensi, yang akan disajikan dalam data dan informasi indikator kesejahteraan rakyat ini, tidak dapat mencakup semua hal keadaan sosial tersebut, sehingga tidak semua indikator dapat digambarkan disini. Oleh karenanya, dalam penyajian ini tercakup data dan informasi statistik yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai dampak pembangunan (*output indicator*), juga dilengkapi dengan berbagai data dan informasi statistik lainnya yang tercakup dalam *input indicator* dan *process indicator*.

#### 1.2. Maksud dan Tujuan

Kegiatan statistik yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik untuk dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik adalah statistik dasar yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, untuk pemerintah maupun masyarakat yang bercirikan nasional, lintas sektor dan makro. Untuk itulah data kesejahteraan rakyat perlu disajikan untuk dapat diketahui dan dievaluasi mengenai pembangunan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai seluruh lapisan masyarakat atau belum, terutama yang menyangkut berbagai aspek pemenuhan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, keamanan dan kesempatan kerja.

#### 1.3. Sistematika Penyajian

Publikasi ini menyajikan informasi dalam bentuk ulasan-ulasan singkat untuk memberikan gambaran tentang keadaan dan perkembangan kesejahteraan rakyat sehingga bisa lebih mudah dipahami.

Penyajiannya terbagi dalam 6 kelompok indikator, yaitu :

- I. Kependudukan dan Keluarga Berencana
- II. Pendidikan
- III. Kesehatan

- IV. Ketenagakerjaan
- V. Perumahan
- VI. Indikator Lainnya

#### 1.4. Sumber Data

Data yang disajikan dalam Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Pekalongan merupakan hasil dari pengolahan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2019, Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2019. Sebagai pelengkap, digunakan data dari survei lainnya dan juga data yang berasal dari hasil pencatatan administrasi berbagai Instansi/Lembaga/Dinas terkait.

Data yang disajikan disini bila disandingkan dengan data pada instansi/lembaga lain menjadi tidak sama, meskipun data tersebut masih pada satu jenis variabel yang sama, hal ini disebabkan adanya perbedaan dalam metodologi hingga pengumpulan data. Namun demikian, kedua sumber data tersebut sama-sama penting, karena dapat saling menunjang dalam menggambarkan pola hubungan pada kesejahteraan penduduk.

# BAB II

KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA



#### 2.1. Pertumbuhan dan Sebaran Penduduk

Jumlah penduduk Kota Pekalongan terus bertambah dari tahun ke tahun, berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2017 adalah sebanyak 301.870 jiwa, kemudian pada tahun 2018 menjadi 304.477 jiwa, dan pada tahun 2019 menjadi sebanyak 307.097 jiwa. Ada pertambahan penduduk dalam kurun waktu tersebut, dari tahun 2017 ke tahun 2018 ada pertambahan sebesar 2.607 jiwa atau sebesar 0,86 persen, kemudian dari tahun 2018 ke 2019 bertambah sebanyak 2.620 jiwa atau sebesar 0,86 persen. Pertumbuhan populasi tersebut disajikan pada Tabel 2.1. dibawah ini.

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2017-2019

Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)
2017	301.870	0,88
2018	304.477	0,86
2019	307.097	0,86

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka 2018-2020

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka berdampak pada tingkat kepadatannya. Kepadatan penduduk Kota Pekalongan mengalami peningkatan kepadatan dari tahun ke tahun, baik ditingkat wilayah Kecamatan hingga secara agregat untuk wilayah se Kota Pekalongan.

#### 2.2. Kepadatan penduduk per kecamatan

Tabel 2.2. Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan Menurut Kecamatan Tahun 2017-2019

		Kepadatan Penduduk			
Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	(Jiwa/Km²) tahun 2017	(Jiwa/Km²) tahun 2018	(Jiwa/Km²) tahun 2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Pekalongan Barat Pekalongan Timur Pekalongan Selatan Pekalongan Utara	10,05 9,52 10,80 14,88	9.379 6.856 5.679 5.448	9.404 6.856 5.733 5.479	9.508 6.918 5.838 5.053	
Kota Pekalongan	45,25	6.672	6.701	6.787	

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka 2018-2020

Pada Tabel 2.2. dapat dilihat bahwa distribusi penduduk pada tingkat kecamatan, yaitu di Kecamatan Pekalongan Barat merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terpadat diantara empat kecamatan yang ada di Kota Pekalongan. Keadaan penduduk di Kecamatan Pekalongan Barat sebagai kecamatan terpadat dari tahun ke tahun, tahun 2017 sebesar 9.379 Jiwa/Km², pada tahun 2018 sebesar 9.404 Jiwa/Km², dan tahun 2019 mencapai sebanyak 9.508 Jiwa/Km². Berturut-turut kemudian adalah Kecamatan Pekalongan Timur, kemudian Kecamatan Pekalongan Selatan, dan Kecamatan Pekalongan Utara. Untuk tingkat kepadatan penduduk yang terendah, yaitu di kecamatan Pekalongan Utara, tercatat pada tahun 2017 sebesar 5.448 Jiwa/Km², meningkat pada tahun 2018 menjadi 5.479 Jiwa/Km², dan pada tahun 2019 sebanyak 5.053 Jiwa/Km². Dengan demikian, tingkat kepadatan Kota Pekalonganpun mengalami hal yang sama, yaitu terjadi peningkatan setiap tahunnya, tahun 2017 sebanyak 6.672 Jiwa/Km², kemudian tahun 2018 menjadi 6.701 Jiwa/Km², dan tahun 2019 mencapai 6.787 Jiwa/Km².

#### 2.3 Penduduk menurut kelompok umur dan dependency ratio

Komposisi penduduk menurut kelompok umur di Kota Pekalongan masih tergolong sebagai daerah dengan struktur penduduk muda, yaitu daerah yang mempunyai proporsi penduduk usia muda, yaitu jumlah penduduk berusia kurang dari 15 tahun masih tinggi. Di sisi lain, proporsi penduduk usia lanjut, yaitu penduduk berusia 65 tahun atau lebih berjumlah sedikit. Akibat dari struktur penduduk yang demikian, maka angka rasio ketergantungan (*dependency ratio*), yaitu jumlah penduduk berusia kurang dari 15 tahun ditambah jumlah penduduk berusia 65 tahun atau lebih, dibagi dengan jumlah penduduk berusia 15 – 64 tahun masih cukup tinggi. Berikut dibawah ini Tabel 2.3 mengenai jumlah penduduk menurut kelompok umur muda, umur produktif, lansia, dan jenis kelamin serta *dependency ratio* tersebut.

Tabel 2.3. Penduduk Kota Pekalongan Menurut Kelompok Umur dan *Dependency Ratio* Tahun 2017-2019

Variabel	Tahun				
v arraber	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(3)		
Kelompok Umur	"Octo				
0 – 14	75.007	74.893	74.780		
15 – 64	211.633	213.702	215.710		
65 atau lebih	15.230	15.882	16.607		
Dependency Ratio					
Muda	35,44	35,05	34,67		
Tua	7,19	7,43	7,70		
Umum	42,64	42,48	42,37		

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka 2018-2020, diolah

Jumlah penduduk usia muda atau yang berusia kurang dari 15 tahun, mengalami penurunan pada tahun 2018, dari 75.007 menjadi 74.893 orang, dan pada tahun 2019 juga menurun menjadi 74.780 orang. Sedangkan pada penduduk usia 15 hingga 64 tahun, mengalami penambahan dari tahun 2017 sampai 2019, yaitu pada tahun 2017 sebanyak 211.633 orang, dan pada tahun 2019 menjadi 215.710 orang. Begitupun panduduk usia lanjut yaitu berusia 65 tahun atau lebih, juga mengalami penambahan, yaitu pada tahun

2017 sebanyak 15.230 orang, tahun 2018 sebanyak 15.882 orang dan tahun 2019 mencapai 16.607 orang. Angka-angka ini dapat juga sebagai berhasilnya menahan laju pertambahan penduduk dari segi kelahiran, karena makin berkurangnya penduduk usia kurang dari 15 tahun.

Untuk angka rasio ketergantungan atau dependency ratio berdasar proporsi penduduk berusia lanjut, maka penduduk usia muda cenderung terus berkurang sedangkan penduduk usia lanjut ini terus mengalami pertumbuhan. Pada Tabel 2.3. diatas terlihat bahwa keadaan angka dependency ratio penduduk usia muda dari tahun ke tahun mengalami penurunan sedangkan penduduk lansia terus mengalami pertambahan. Rasio ketergantungan ini pada tahun 2017 mencapai 42,64 persen, tahun 2018 menjadi 42,48 persen, dan terus berkurang pada tahun 2019 menjadi 42,37 persen. Angka ini menggambarkan bahwa pada tahun 2017 ada total 42,64 persen yang menjadi tanggungan penduduk usia produktif yaitu penduduk berusia 15 hingga 64 tahun. Tanggungan tersebut terdiri dari 35,44 persen penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun, dan 7,19 persen penduduk lansia. Atau dengan kata lain adalah bahwa di tahun 2017, pada setiap 100 orang penduduk, maka ada kira-kira 42-43 orang yang menjadi tanggungan penduduk usia produktif, yang terdiri dari 35 anak-anak dan 7 orang lansia. Hingga tahun 2019 secara total berkurang menjadi 42,37 persen yang menjadi tanggungan penduduk usia produktif, yang terdiri dari 34,67 persen penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun, dan 7,70 persen penduduk lansia. Atau dengan kata lain adalah bahwa di tahun 2019, pada setiap 100 orang penduduk, maka ada kira-kira 42 orang yang menjadi tanggungan penduduk usia produktif, yang terdiri dari 35 anak-anak dan 8 orang lansia.

#### 2.4. Perkawinan

Salah satu indikator kesejahteraan rakyat adalah status perkawinan. Melalui indikator ini dapat dilihat gambaran aspek sosial penduduk, diantaranya adalah ketenteraman, ketenangan dan kecukupan ekonomi rumahtangga. Berikut dibawah ini pada Tabel 2.4 mengenai penduduk usia 10 tahun atau lebih dengan status perkawinan dan menurut jenis kelamin tahun 2017 dan tahun 2019

Tabel 2.4. Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Status Perkawinan di Kota Pekalongan Tahun 2017-2019

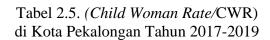
Status Perkawinan	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)
(1)	(2)	(3)	(3)
Belum Kawin	36,62	37,67	37,16
Kawin	54,00	52,46	53,05
Cerai Hidup	2,05	1,94	2,05
Cerai Mati	7,34	7,93	7,74

Sumber: Statistik Sosial dan Kependudukan Jawa Tengah Hasil Susenas 2017-2019

Penduduk usia 10 tahun atau lebih, yang berstatus Belum Kawin pada tahun 2017 sebanyak 36,62 dan pada tahun 2018 sebesar 37,67 yang kemudian pada tahun 2019 mencapai 37,16 persen. Pada penduduk yang berstatus Kawin, pada tahun 2017 sebanyak 54,00 persen, kemudian pada tahun 2018 sebanyak 52,46 persen dan tahun 2019 bertambah menjadi 53,05 persen. Pada penduduk yang berstatus Cerai Hidup, cenderung berfluktuatif setiap tahunnya, pada tahun 2017 sebanyak 2,05 persen, pada tahun 2018 turun menjadi 1,94 persen, dan pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi 2,05 persen. Penduduk yang berstatus cerai mati pada tahun 2017 sebesar 7,34 persen, pada tahun 2018 sebanyak 7,93 persen, dan pada tahun 2019 sebanyak 7,74 persen.

#### 2.5. Rasio Anak-Ibu atau Child Woman Ratio (CWR)

Di Kota Pekalongan, rasio jumlah anak berusia kurang dari 5 tahun atau balita terhadap jumlah penduduk perempuan berusia subur atau reproduksi 15 sampai dengan 49 tahun, atau disebut sebagai *Child Woman Ratio* (*CWR*) makin berkurang. Semakin tinggi angka *CWR* ini maka menunjukkan kejadian kelahiran yang semakin tinggi. Rasio balita terhadap ibu usia subur atau reproduksi ini pada tahun 2017 mencapai 296, kemudian pada tahun 2018 yaitu 293, dan semakin berkurang pada tahun 2019 menjadi 290. Angka ini menunjukkan bahwa tahun 2017 pada sejumlah 1.000 orang perempuan berusia subur atau reproduktif, maka terdapat 296 orang anak berusia kurang dari atau dibawah 5 tahun atau balita. Pada *Child woman rate* tahun berikutnya, yaitu tahun 2018 berkurang menjadi 293 balita, dan kemudian tahun 2019 menjadi sebanyak 290 balita.



Kecamatan	CWR		
	2017	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Pekalongan Barat	295	292	289
Pekalongan Timur	280	278	275
Pekalongan Selatan	317	313	310
Pekalongan Utara	293	290	287
Jumlah	296	293	290

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka 2018-2020

# BAB III

PENDIDIKAN

.IIPekalong

#### BAB III PENDIDIKAN

Secara umum pendidikan diartikan sebagai usaha manusia untuk menambah ilmu pengetahuan, yang dalam hal ini dapat dicapai melalui bangku sekolah formal. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa inilah peran aktif seluruh elemen bangsa pada bidang pendidikan sangat diperlukan.

#### 3.1. Sarana dan Prasarana Sekolah

Keseimbangan antara jumlah penduduk yang berminat untuk sekolah atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan sarana dan prasarana yang ada pada masing-masing jenjang pendidikan, merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi sekolah.

Tabel 3.1. Rasio Antara Murid Terhadap Sekolah dan Guru di Kota Pekalongan Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2017-2019

Tingkat	Murid/	Murid/	Murid/	Murid /	Murid /	Murid /
Pendidikan	Sekolah	Sekolah	Sekolah	Guru	Guru	Guru
1 Chalaikan	2017	2018	2019	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Setara SD	217	219	215	18,11	17,27	17,43
Setara SLTP	425	419	404	17,74	16,67	16,89
Setara SMA	462	513	515	14,60	15,27	14,07

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka 2018-2020, diolah

Pada Tabel 3.1. diatas menurut jenjang pendidikan setara SD, pada tahun 2017 di satu sekolah rata-rata dapat menampung 217 orang murid atau anak didik, yang kemudian pada tahun 2018 menjadi sebanyak 219 murid, dan tahun 2019 sebanyak 215 murid. Pada jenjang pendidikan setara SLTP pada tahun 2017, satu sekolah rata-rata dapat menampung 404 murid, dan pada tahun 2018 sebanyak 419 murid, kemudian pada tahun

2019 menampung sebanyak 404 murid. Pada jenjang pendidikan setara SLTA, pada tahun 2017 di satu sekolah rata-rata dapat menampung 462 murid, lalu pada tahun 2018 sebanyak 513 murid, dan pada tahun 2019 menampung sebesar 515 murid. Secara keseluruhan, pada setiap tahunnya penerimaan murid atau anak didik pada semua jenjang pendidikan di Kota Pekalongan di tiap sekolah berubah-ubah jumlahnya.

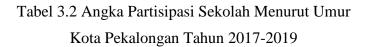
Untuk melihat gambaran beban mengajar sesuai Tabel 3.1. tersebut di atas, pada jenjang sekolah tingkat Sekolah Dasar pada tahun 2017, seorang guru rata-rata mengajar 18 murid, lalu menurun pada tahun 2018 seorang guru rata-rata mengajar 17 murid, dan pada tahun 2019 seorang guru rata-rata mengajar 17 murid.

Pada jenjang sekolah tingkat SLTP, pada tahun 2017 seorang guru rata-rata mengajar 18 murid, lalu pada tahun 2018 rata-rata mengajar 15 murid, dan pada tahun 2019 seorang guru rata-rata mengajar 17 murid.

Pada jenjang sekolah tingkat SLTA, pada tahun 2017, seorang guru rata-rata mengajar 15 murid, lalu pada tahun 2018 seorang guru rata-rata mengajar 15 murid, dan menurun pada tahun 2019 seorang guru rata-rata mengajar 14 murid.

#### 3.2. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah untuk kelompok umur 7 hingga 12 tahun, secara umum menggambarkan bahwa tidak ada yang tidak bersekolah ataupun tidak ada penduduk yang belum pernah sekolah. Namun tidak dapat dipungkiri, ketika pada kelompok umur yang semakin meningkat, maka makin berkurang angka partisipasi sekolah tersebut. Data pada Tabel 3.2. di bawah ini menggambarkan bahwa pendidikan penduduk mengalami perubahan yaitu semakin berkurang ketika berusia semakin tua. Pada beberapa kasus di lapangan, jumlah putus sekolah disebabkan adanya motivasi ekonomi dalam keluarga sebagai penyebabnya, yaitu anak-anak membantu orang tua mencari nafkah dengan cara bekerja pada waktu anak-anak lainnya yang secara ekonomi mampu bersekolah. Pemerintah telah menetapkan program wajib belajar, namun kenyataannya pada beberapa keluarga tidak mampu untuk membiayai seperti untuk pakaian dan tas, juga transportasi pulang-pergi ke sekolah dan untuk pembelian alat tulis.



Uraian	Umur	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	7-12 Tahun	99,73	100,00	99,89
Angka partisipasi Sekolah	13-15 Tahun	95,97	95,23	95,87
	16-18 Tahun	66,08	61,32	64,98
	19-24 Tahun	25,25	14,81	N.A
		*3.00		

Sumber: BPS Kota Pekalongan

Angka Partisipasi Sekolah usia 7-12 tahun pada tahun 2017 sebesar 99,73 persen, lalu tahun 2018 menjadi sebesar 100,00 persen, dan tahun 2019 sebesar 99,89 persen. Pada tahun 2019, angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun di Kota Pekalongan turun menjadi 99,89 persen. Hal ini berarti untuk tingkat sekolah dasar pada tahun 2019, masih ada penduduk usia 7-12 tahun (usia sekolah dasar) sebanyak 0,11 persen yang belum bersekolah/tidak bersekolah lagi.

Pada penduduk usia 13-15 tahun, angka partisipasi sekolah dari tahun 2017 ke tahun 2018 menunjukkan penurunan, namun menunjukkan kenaikan pada tahun 2019. Pada tahun 2017 sebesar 95,97 persen, tahun 2018 sebesar 95,23 persen, dan tahun 2019 mencapai 95,87 persen. Angka terakhir tahun 2019 tersebut menunjukkan bahwa masih ada sekitar 4,13 persen penduduk usia 13-15 tahun yang belum mengenyam pendidikan, dalam hal ini adalah pendidikan pada jenjang SLTP atau setara. Secara kenyataan, penduduk pada usia ini ada yang telah mendapat pekerjaan untuk membantu orang tuanya, sehingga tidak bersekolah lagi.

Pada penduduk usia 16-18 tahun, angka partisipasi sekolah dari tahun 2017 ke tahun 2018 menunjukkan adanya penurunan, namun menunjukkan kenaikan pada tahun 2019. Pada tahun 2017 hanya sebesar 66,08 persen, lalu pada tahun 2018 turun menjadi 61,32 persen, dan pada tahun 2019 sebesar 64,98 persen. Hal ini memperlihatkan bahwa pada golongan usia ini, tingkat partisipasi sekolah penduduk makin kecil atau sedikit, yang terakhir yaitu tahun 2019 terlihat masih ada sepertiga penduduk pada tingkatan usia ini yang belum mengenyam pendidikan hingga jenjamg SLTA/setara.

Pada penduduk usia 19-24 tahun, angka partisipasi sekolah juga terlihat ada penurunan, pada tahun 2017 sebesar 25,25 persen, lalu berkurang di tahun 2018 menjadi 14,81 persen, sedangkan pada tahun 2019 tidak diperoleh data tersebut. Pada usia ini umumnya adalah sekolah pada jenjang pendidikan sekolah tinggi atau universitas, yang kenyataannya memang membutuhkan biaya yang cukup besar dan keinginan yang tinggi, sehingga banyak yang belum mampu untuk menempuh pendidikannya.

Tabel 3.3 Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2017-2019

1 Chalaikan Kota 1 Ckalongan Tahun 2017-2017						
Uraian	Jenjang pendidikan	2017	2018	2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
Angka Partisipasi Kasar/ GER (Gross Enrollment Ratio)	SD SLTP SLTA PT	114,47 82,97 92,04 18,22	110,86 74,54 74,41 17,13	112,45 75,91 74,92 <i>N.A</i>		
Angka Partisipasi Murni/ NER (Net Enrollment Ratio)	SD SLTP SLTA PT	98,23 74,08 55,32 14,24	100,00 72,00 54,88 14,81	99,52 71,85 54,81 <i>N.A</i>		

Sumber: BPS Kota Pekalongan

Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan SD di Kota Pekalongan mencapai lebih dari 100 persen. Pada tahun 2017 sebesar 114,47 persen, lalu pada tahun 2018 menjadi 110,86 persen, dan tahun 2019 mencapai 112,45 persen. Angka yang melebihi seratus persen ini menunjukkan bahwa pada tahun 2017 ada sebanyak 14,47 persen, lalu tahun 2018 ada 10,86 persen, dan tahun 2019 ada 12,45 persen penduduk

yang belum berusia 7 tahun tapi sudah bersekolah di jenjang pendidikan SD dan atau ada pula anak yang berusia lebih dari 12 tahun tapi masih bersekolah di jenjang pendidikan SD.

Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan SLTP di Kota Pekalongan pada tahun 2017 sebesar 82,97 persen, lalu tahun 2018 mencapai 74,54 persen, dan tahun 2019 sebesar 74,91 persen. Melihat kondisi tahun 2019 tersebut, maka perlu dilakukan berbagai upaya agar anak-anak yang sebanyak 25,09 persen atau seperempat lebih pada usia tersebut dapat terus bersekolah dan menamatkannya.

Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan SLTA di Kota Pekalongan, menunjukkan penurunan dari tahun 2017 hingga 2018. Pada tahun 2017, APK pada jenjang pendidikan SLTA sebesar 92,04 persen. Namun, pada tahun 2018 APK pada jenjang pendidikan SLTA turun menjadi 74,41 persen dan tahun 2019 naik menjadi 74,92 persen. Melihat kondisi APK tahun 2018 dan 2019, maka perlu dilakukan upaya agar anak-anak yang sebanyak 25,59 persen pada tahun 2018 dan 25,09 pada tahun 2019 agar dapat terus bersekolah dan menamatkannya.

Untuk APK pada jenjang pendidikan tinggi di Kota Pekalongan, secara total dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2017 mencapai 18,22 persen, lalu tahun 2018 menjadi 17,13 persen. Sedangkan data tahun 2019 tidak tersedia. Hal ini berarti bahwa penduduk Kota Pekalongan pada usia jenjang tersebut semakin banyak yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Disamping itu tersedianya fasilitas lembaga pendidikan pada jenjang perguruan tinggi yang semakin memadai di Kota Pekalongan sehingga mendorong untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi.

Pada ukuran pendidikan penduduk yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) terjemahan dari *Net Enrollment Ratio* (*NER*), menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya. APM di Kota Pekalongan untuk jenjang pendidikan tingkat SD, pada tahun 2017 sebesar 98,23 persen, lalu tahun 2018 naik menjadi 100,00 persen, dan tahun 2018 turun menjadi 99,52 persen. Ini menandakan bahwa hampir seluruh anak usia 7 hingga 12 tahun adalah bersekolah di jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya.

Untuk APM di Kota Pekalongan pada jenjang pendidikan tingkat SLTP, pada tahun 2017 sebesar 74,08 persen, lalu pada tahun 2018 sebesar 72,00 persen, dan pada tahun 2019 sebesar 71,85 persen. Hal ini secara umum hingga keadaan tahun 2019, berarti ada penurunan jumlah peserta didik usia 13–15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SLTP. Jumlah yang tidak bersekolah mencapai 28,15 persen atau seperempat lebih dari total jumlah anak usia tersebut. Perlu didalami kenyataan ini, walaupun yang tampak dipermukaan adalah masalah ekonomi keluarga.

Kemudian APM di Kota Pekalongan pada jenjang pendidikan tingkat SLTA, pada tahun 2017 sebesar 55,32 persen, lalu pada tahun 2018 sebesar 54,88 persen, dan pada tahun 2019 mencapai 54,81 persen. Hal ini berarti bahwa penduduk usia 16–18 tahun yang bersekolah mengalami sedikit peningkatan dari tahun ke tahun. Masih ada kurang lebih separuh dari total jumlah anak pada usia tersebut yang tidak bersekolah.

APM pada jenjang pendidikan tingkat Pendidikan Tinggi, yaitu penduduk berusia lebih dari 18 tahun yang menempuh pendidikan tinggi, di Kota Pekalongan mengalami peningkatan pada penduduk yang mengenyam pendidikan tinggi ini. Pada tahun 2017 mencapai 14,24 persen, lalu tahun 2018 meningkat menjadi 14,81 persen, sedangkan pada tahun 2019 data tidak tersedia.

#### 3.3. Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan

Secara spesifik, kualitas sumber daya manusia yang ada di Kota Pekalongan, dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Pada Tabel 3.4 dibawah ini dapat diketahui seberapa banyak penduduk Kota Pekalongan, yang berusia 15 tahun atau lebih, berdasarkan pendidikan tinggi yang ditamatkan menurut tingkatan pendidikan.

Penduduk Kota Pekalongan yang berusia 10 tahun atau lebih yang tidak mempunyai ijazah semakin meningkat jumlahnya, sehingga hal ini dapat menjadi perhatian yang bagi berbagai pihak yang peduli pada pendidikan, khususnya pendidikan formal. Demikian pula pada penduduk yang berusia 10 tahun atau lebih yang belum tamat SD juga semakin meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun.

Tabel 3.4. Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kota Pekalongan Tahun 2017-2019

Pendidikan Tertinggi yang	Penduduk Usia 10 keatas			
Ditamatkan	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	
Tidak/Belum Pernah Sekolah	1,87	1,53	0,87	
Tidak/Belum Tamat SD sederajat	15,86	18,41	15,78	
SD sederajat	28,04	27,96	27,51	
SMP sederajat	21,42	20,61	25,82	
SMA sederajat	26,73	25,32	22,66	
Diploma I/II/III/Sarjana Muda	1,35	1,79	1,81	
Diploma IV/S1/S2	4,74	4,37	5,55	
Jumlah	100,00	100,00	100,00	

Sumber : Statistik Sosial Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Hasil Susenas 2017-2019

Pada penduduk yang berijazah SMP atau sederajat, sempat mengalami penurunan pada tahun 2018, namun kembali meningkat pada tahun 2019. Pada tahun 2017 sebesar 26,73 persen, lalu tahun 2018 turun menjadi sebesar 20,61 persen, tetapi pada tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu menjadi 25,82 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih sedikitnya anak pada usia ini yang menamatkan sekolahnya. Hal ini bisa disebabkan seperti yang telah diutarakan diatas yaitu masalah ekonomi keluarga, anak-anak turut mencari nafkah bagi keluarganya sehingga pada usia ini banyak kasus putus sekolah.

Kemudian pada penduduk Kota Pekalongan yang berusia 10 tahun atau lebih yang berijazah SMA atau sederajat, pada tahun 2017 sebanyak 26,73 persen, lalu pada tahun 2018 turun menjadi 25,32 persen, dan pada tahun 2019 menjadi sebesar 22,66 persen. Berkurangnya jumlah penduduk yang berijazah SMA atau yang sederajat dari tahun ke

tahun, dapat diartikan sebagai banyaknya penduduk Kota Pekalongan yang melanjutkan pendidikan atau bekerja di luar kota..

Untuk penduduk yang berusia 10 tahun atau lebih yang memiliki ijazah Diploma I/II/III, jumlahnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 sebanyak 1,35 persen, lalu pada tahun 2018 meningkat menjadi 1,79 persen, dan terus meningkat pada tahun 2019 menjadi sebesar 1,81 persen.

Demikian pula penduduk pemilik ijazah Diploma IV/S1/S2 di Kota Pekalongan, jumlahnya mengalami penurunan pada tahun 2018, namun kembali meningkat pada tahun 2019. Pada tahun 2017 sebanyak 4,74 persen, lalu pada tahun 2018 turun menjadi 4,37 persen, dan meningkat menjadi sebesar 5,55 persen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya penduduk Kota Pekalongan yang menamatkan pendidikannya sampai jenjang Diploma IV/S1/S2. Hal ini sejalan dengan tersedianya lembaga pendidikan tinggi yang ada di Kota Pekalongan.

Tabel 3.5. Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Penduduk Kota Pekalongan 2017 - 2019

Uraian	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,56	8,57	8,71
Harapan lama Sekolah (Tahun)	12,78	12,79	12,83

Sumber : BPS Kota Pekalongan

Rata-rata lama sekolah penduduk di Kota Pekalongan adalah setingkat dengan jenjang pendidikan tingkat SLTP kelas 2 atau belum tamat SLTP, yaitu tahun 2017 selama 8,56 tahun, lalu tahun 2018 selama 8,57 tahun, dan tahun 2019 selama 8,71 tahun. Ada peningkatan yang cukup lamban pada rata-rata lama sekolah penduduk di Kota Pekalongan ini dari tahun ke tahun. Rata-rata lama sekolah ini dapat ditingkatkan melalui program Kejar Paket A, B dan C, sehingga penduduk dapat lebih terdidik secara formal.

Harapan lama sekolah penduduk di Kota Pekalongan juga mengalami peningkatan walaupun masih dapat ditingkatkan lagi akselerasinya karena ketersediaan lembaga pendidikan tinggi cukup memadai. Harapan lama sekolah ini diukur pada penduduk berusia 7 tahun atau lebih. Pada tahun 2017 sebesar 12,78 tahun, berarti setingkat dengan tahun pertama pendidikan tinggi. Kemudian tahun 2018 selama 12,79 tahun, yang berarti sama yaitu setingkat dengan tahun pertama pendidikan tinggi, dan pada tahun 2019 selama 12,83 tahun, yang berarti sama mengenyam pendidikan pada tahun pertama di perguruan tinggi, tepatnya kuliah semester II.

# BAB IV KESEHATAN

# BAB IV KESEHATAN

Kesehatan masyarakat adalah indikator penting dari seluruh indikator yang ada dan merupakan faktor penting dari produktivitas ekonomi untuk mencapai masyarakat Kota Pekalongan yang berkualitas, maka pemerintah Kota Pekalongan berupaya terus dengan berbagai macam program untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik bagi masyarakatnya.

Tabel 4.1. Banyaknya Tenaga dan Tempat Pelayanan Kesehatan di Kota Pekalongan Tahun 2017-2019

Tenaga & Tempat Pelayanan Kesehatan	Tahun		
	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Dokter	393	356	336
Bidan	260	351	339
Puskesmas	14	14	14
Posyandu	407	358	411
Rumah Sakit	7	8	9
Rumah Sakit Bersalin	1	1	0

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka 2018-2020

## 4.1. Pelayanan Kesehatan

Secara umum, saat ini terlihat peningkatan jumlah sarana dan prasarana kesehatan, yang hal ini diharapkan dapat ikut membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diantaranya adalah dengan tersedianya tenaga kesehatan terdidik lainnya selain dokter, dan tempat-tempat pelayanan kesehatan yang dekat dan terjangkau jaraknya oleh masyarakat.

Pada Tabel 4.1 di atas, secara keseluruhan terdapat penurunan jumlah tenaga medis khususnya dokter dan bidan pada tahun 2019, pada tahun 2017 sebanyak 393 orang dokter, dan pada tahun 2018 turun menjadi 356 orang dokter, lalu pada tahun 2019 menurun kembali jumlahnya menjadi 336 orang dokter. Demikian pula jumlah bidan, ada penurunan pada tahun 2019 namun sempat bertambah pada tahun 2018. Pada tahun 2017 sebanyak 260 bidan, tahun 2018 sebanyak 351 orang bidan, dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 339 orang bidan. Hal ini mengisyaratkan bahwa perlu perhatian terhadap jumlah tenaga medis di Kota Pekalongan sehingga pelayanan kesehatan secara prima tetap bisa diberikan kepada masyarakat.

Tenaga kesehatan terdidik yang makin memadai jumlahnya, tercukupinya sarana dan prasarana kesehatan seperti Rumah Sakit, Rumah Sakit Bersalin, Puskesmas hingga Posyandu, juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang peningkatan derajat kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Disamping itu, yang terpenting adalah sikap masyarakat Kota Pekalongan yang makin baik kesadarannya untuk menjaga kesehatan, sehingga Kota Pekalongan adalah kota yang sehat.

# 4.2. Morbiditas (Angka Kesakitan)

Angka kesakitan (morbiditas) merupakan indikator penting yang digunakan untuk penilaian dan perencanaan program yang bertujuan untuk menurunkan kesakitan dan kematian di suatu wilayah. Tingkat angka kesakitan mempunyai peranan yang lebih penting dibandingkan dengan angka kematian karena apabila angka kesakitan tinggi maka akan memicu kematian sehingga otomatis menyebabkan angka kematian juga tinggi.

Pada Tabel 4.2. dibawah menggambarkan angka kesakitan di Kota Pekalongan menurut jenis kelamin. Angka kesakitan jenis kelamin perempuan lebih tinggi dibandingkan angka kesakitan jenis kelamin laki-laki. Hal ini salah satunya dikarenakan perempuan melahirkan anak sedangkan laki-laki tidak sehingga presebtase angka kesakitan perempuan lebih tinggi dibandingka laki-laki.

Angka kesakitan untuk jenis kelamin laki-laki setiap tahun mengalami peningkatan, tahun 2017 sebesar 10,59 persen, pada tahun 2018 meningkat menjadi 11,86 persen dan pada tahun 2019 meningkat lagi menjadi 15,94 persen. Hal ini menunjukkan

bahwa ada peningkatan kasus penyakit yang diderita oleh penduduk laki-laki di Kota Pekalongan.

Angka kesakitan jenis kelamin perempuan ada penurunan di tahun 2018 dibandingkan tahun 2017, namun meningkat kembali pada tahun 2019. Pada tahun 2017 angka kesakitan jenis kelamin perempuan sebesar 16,06 persen, kemudian turun pada tahun 2018 sebesar 14,29 persen tetapi naik kembali pada tahun 2019 sebesar 17,43 persen. Secara total, angka kesakitan mengalami peningkatan pada tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 sebesar 13,07 persen sedangkan tahun 2019 angka kesakitan sebesar 16,68. Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah kasus penyakit di Kota Pekalongan yang berpotensi menyebabkan kematian.

Perlu adanya upaya Pemerintah untuk memberikan wawasan kepada masyarakat Kota Pekalongan tentang pentingnya imunisasi lengkap bagi balita untuk menunjang kesehatannya kelak.

Tabel 4.2 Angka Kesakitan di Kota Pekalongan Tahun 2017-2019

Angka Kesakitan				
Jenis Kelamin	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	
Laki-laki	10,59	11,86	15,94	
Perempuan	16,06	14,29	17,43	
Laki-laki+Perempuan	13,33	13,07	16,68	

Sumber: Statistik Sosial dan Kependudukan Jawa Tengah Hasil Susenas 2017-2019

# 4.3 Aseptor KB

Untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, maka Pemerintah Kota Pekalongan mengupayakan melalui program keluarga berencana (KB). Jumlah peserta KB yang aktif saat ini dapat dilihat pada Tabel 4.3 di bawah ini. Penduduk perempuan yang sedang menggunakan/memakai alat/cara KB mengalami penurunan persentasenya, pada tahun 2017 sebesar 48,38 persen, lalu pada tahun 2018 menjadi 45,14 persen, dan pada tahun 2019 menjadi 41,34 persen. Untuk yang pernah menggunakan alat/cara KB

dari tahun ke tahun mengalami kenaikan persentasenya, hingga tahun 2019 hanya sebanyak 17,32 persen.

Tabel. 4.3. Persentase Perempuan Usia 15-49 Tahun Berstatus Kawin Menurut Pemakaian Alat KB Tahun 2017-2019

Uraian	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Ya, Pernah Menggunakan alat/cara KB	12,12	16,65	17,32
Ya, Sedang Menggunakan alat/cara KB	48,38	45,14	41,34
Tidak Pernah Menggunakan alat/cara KB	39,50	38,21	41,33

Sumber: Statistik Sosial dan Kependudukan Jawa Tengah Hasil SUsenas 2017-2019

Sedangkan untuk yang tidak pernah menggunakan alat KB/cara KB mengalami penurunan dari tahun 2017 ke tahun 2018, tetapi mengalami kenaikan pada tahun 2019. Pada tahun 2017 sebesar 39,50 persen turun menjadi 38,21 persen pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 naik menjadi 41,33 persen. Hal ini menjadi tantangan bagi para pengampu kepentingan di bidang keluarga berencana dalam menyadarkan penggunaan alat/cara KB agar program KB sukses.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, pada Tabel 4.4 dibawah ini, tercatat mengenai persentase akseptor KB dan alat kontrasepsi yang digunakan oleh para peserta program KB di Kota Pekalongan tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, tahun 2019 data tidak tersedia.

Pada alat/cara KB yang paling banyak digunakan dari tahun 2017 sampai tahun 2018 adalah suntik KB yaitu tahun 2017 sebanyak 52,61 persen, lalu tahun 2018 sebesar 49,60 persen. Kemudian pemakaian Pil KB adalah alat kontrasepsi pilihan kedua, berturut-turut tahun 2017 yaitu 10,99 persen dan tahun 2018 sebanyak 16,68 persen. Selanjutnya pengguna alat/cara AKDR/IUD/Spiral menjadi urutan ketiga pada tahun 2018. Persentase akseptor KB pada alat/cara KB tersebut yaitu berturut-turut sebanyak 13,62 persen pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebanyak 11,75 persen. Alat kontrasepsi yang dipakai berupa susuk KB merupakan urutan yang keempat pada tahun 2018 yang terbanyak pemakainya, kemudian alat/cara MOW/Tubektomi dan pengguna alat KB Lainnya.

Tabel 4.4. Persentase Akseptor KB Menurut Kontrasepsi Yang Sedang Digunakan di Kota Pekalongan 2017-2019

Jenis Kontrasepsi	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
MOW/Tubektomi	10,08	6,61	N.A
MOP/Vasektomi	0,00	0,00	N.A
AKDR/IUD/Spiral	13,62	11,75	N.A
Suntikan KB	52,61	49,60	N.A
Susuk KB	4,80	8,93	N.A
Pil KB	10,99	16,68	N.A
Lainnya	7,91	6,43	N.A

Sumber : Statistik Sosial dan Kependudukan Jawa Tengah Hasil Susenas 2017-2019

# BAB V KETENAGAKERJAAN

# BAB V KETENAGAKERJAAN

# 5.1. Penduduk Usia Kerja

Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih. Penduduk Usia Kerja dapat digolongkan pada Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Angkatan Kerja merupakan penduduk yang bekerja, atau yang sedang mencari pekerjaan, dan yang sedang menganggur. Selanjutnya, Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk yang sedang sekolah, atau yang mengurus rumahtangga, atau penduduk yang tidak melakukan kegiatan secara ekonomi yaitu sedang mengikuti kursus atau pelatihan.

Angkatan kerja mengarah pada kelompok penduduk yang berada pada pasar kerja, yaitu penduduk yang berumur 15 tahun atau lebih yang siap terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Mereka yang dapat diserap oleh pasar kerja dikategorikan sebagai bekerja, sedangkan yang tidak/belum diserap oleh pasar kerja, yaitu mereka yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, dikategorikan sebagai penganggur (terbuka). Dalam kerangka ini, kesempatan kerja kemudian diartikan sebagai penduduk usia kerja yang berpontensi dapat diserap oleh pasar kerja.

Disisi lain, mereka yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi digolongkan sebagai bukan angkatan kerja, yaitu mereka yang kegiatan utamanya adalah mengurus rumahtangga, atau yang sedang kursus/pelatihan, juga penduduk yang sedang sekolah, ataupun penduduk yang telah berusia 15 tahun atau lebih yang tidak mampu melakukan kegiatan karena usia tua atau alasan fisik (cacat).

Dalam rangka penyusunan strategis dan program ketenagakerjaan untuk pemecahan masalah, dibutuhkan ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Ada beberapa tabel yang dapat di lihat di bawah ini sebagai ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan.

Tabel 5.1 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Utama Tahun 2017-2019

Kegiatan Utama	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja :	69,28	70,21	72,32
<ul><li>Bekerja</li><li>Mencari Kerja</li></ul>	65,78 3,50	65,90 4,31	68,15 4,17
Bukan Angkatan Kerja :	30,72	29,79	27,68
<ul><li>Sekolah</li><li>Mengurus RT</li><li>Lainnya</li></ul>	6,38 20,71 3,63	9,12 17,16 3,51	8,44 14,60 4,64

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka 2018-2020, diolah

Pada Tabel 5.1. dapat dilihat bahwa Angkatan Kerja Kota Pekalongan Tahun 2017 sebesar 69,28 persen, tahun 2018 sebesar 70,21 persen dan tahun 2019 sebesar 72,32 persen dari seluruh penduduk usia kerja. Hal ini berarti ada kenaikan jumlah Angkatan Kerja. Penduduk yang bekerja pada tahun 2017 adalah sebanyak 65,78 persen dari jumlah Angkatan Kerja, kemudian mengalami kenaikan pada tahun berikutnya menjadi 65,90 persen dan tahun 2019 mengalami kenaikan juga menjadi 68,15 persen. Begitupun dengan pencari kerja, mengalami kenaikan dari tahun 2017 ke tahun 2018 tetapi mengalami penurunan sedikit pada tahun 2019, dimana pada tahun 2017 sebesar 3,50 persen, pada tahun 2018 naik menjadi 4,31 persen dan pada tahun 2019 turun menjadi 4,17 persen.

Pada Bukan Angkatan Kerja, pada tahun 2017 sebesar 30,72 persen, pada tahun 2018 menurun menjadi 29,79 persen, begitu juga pada tahun 2019 turun menjadi 27,68 persen. Bukan angkatan kerja ini terdiri dari penduduk 15 tahun ke atas yang sedang bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Pada penduduk yang sedang bersekolah, yang pada tahun 2017 sebanyak 6,38 persen, kemudian mengalami kenaikan

pada tahun 2018 menjadi 9,12 persen dan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjasi 8,55 persen. Sedangkan pada Bukan angkatan kerja, yaitu pada penduduk yang mengurus rumahtangga mengalami penurunan dari tahun ke tahun, itu berarti merupakan fenomena di masyarakat menandakan bahwa semakin banyak penduduk usia 16 tahun atau lebih yang bukan angkatan kerja yang semula mengurus rumahtangga kemudian ikut bekerja mencari nafkah.

# 5.2. Angkatan Kerja

Angkatan kerja merupakan kelompok penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih yang sedang bekerja, maupun mereka yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, dan mereka yang tidak bekerja atau sedang menganggur, dalam hal ini penduduk usia kerja yang menganggur berpontensi dapat diserap oleh pasar kerja.

Pada Tabel 5.2 berikut dibawah ini adalah menggambarkan tingkat partisipasi dan tingkat pengangguran terbuka Angkatan kerja di Kota Pekalongan pada 3 (tiga) tahun terakhir ini, yaitu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 5.2 TPAK dan TPT Kota Pekalongan Tahun 2017-2019

	Indikator	2017	2018	2019
	(1)	(2)	(3)	(4)
	Laki-laki	84,10	80,05	82,67
TPAK	Perempuan	54,76	60,56	62,17
	Total laki+perempuan	69,28	70,21	72,32
	Laki-laki	5,43	6,16	6,03
TPT	Perempuan	4,48	6,10	5,01
	Total laki+perempuan	5,05	6,13	5,77

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka 2018-2020, diolah

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kota Pekalongan tahun 2017 sebesar 69,28 persen, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2018 adalah 70,21 persen dan pada tahun 2019 juga mengalami kenaikan menjadi 72,32 persen. Secara gender, pada tahun 2018, TPAK laki - laki sebesar 80,05 persen dan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2017, sebesar 84,10 persen, namun mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 82,67 persen. Sedangkan pada TPAK Perempuan, pada tahun 2018 sebesar 60,56 persen mengalami kenaikan yang cukup nyata dibandingkan tahun 2017 yang hanya sebesar 54,76 persen dan di tahun 2019 juga mengalami kenaikan menjadi 62,17. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya jumlah perempuan yang bekerja dalam meningkatkan ekonomi keluarga.

# 5.3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengindikasi tentang Angkatan Kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran, yaitu orang yang sama sekali tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. TPT dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja, yang dinyatakan dalam persentase. TPT di Kota Pekalongan pada tahun 2017 yaitu sebesar 5,05 persen, dan pada tahun 2018 sebesar 6,13 persen sedangkan pada tahun 2019 turun menjadi 5,77 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 orang Angkatan Kerja, terdapat sekitar 5 orang yang menganggur pada tahun 2017 dan 6 orang pada tahun 2018, sedangkan pada tahun 2019 terdapat sekitar 5-6 orang yang menganggur. Bila dilihat menurut jenis kelamin, TPT laki-laki pada tahun 2018 adalah 6,16 persen meningkat dibandingkan tahun 2017 yang hanya sebesar 5,43 persen. Namun, pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 6,03 persen. Sedangkan TPT perempuan pada tahun 2018 sebesar 6,10 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 yang hanya sebesar 4,48 persen, namun pada tahun 2019 turun menjadi 5,01 persen. Angka tersebut berarti bahwa dari 100 orang Angkatan Kerja perempuan pada tahun 2017 terdapat sebanyak 4 orang yang menganggur, kemudian pada pada tahun 2018 bertambah menjadi 6 orang yang menganggur dan pada tahun 2019 berkurang menjadi 5 orang perempuan yang menganggur.

# 5.4. Penduduk yang Bekerja menurut lapangan usaha

Perubahan komposisi ketenagakerjaan yaitu bekerja menurut Lapangan Usaha, penduduk Kota Pekalongan yang bekerja di sektor industri merupakan jumlah yang terbanyak. Hal ini tercermin pada paling tingginya persentase penduduk yang bekerja di sektor industri, yaitu pada tahun 2017 sebanyak 35,16 persen, kemudian pada tahun 2018 menjadi 36,03 persen dan pada tahun 2019 menjadi 36,47 persen. Selanjutnya, sektor perdagangan merupakan pilihan kedua penduduk Kota Pekalongan dalam mencari mata pencaharian, yaitu pada tahun 2017 sebanyak 30,81 persen dan sedikit menurun pada tahun 2018 menjadi 29,52 persen kemudian meningkat kembali pada tahun 2019 menjadi 31,14 persen. Kemudian sektor lainnya yang meliputi lapangan usaha Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan serta Jasa kemasyarakatan, soial dan perorangan, merupakan sektor ketiga terbesar sebagai sumber mata pencaharian, yaitu pada tahun 2017 sebanyak sebesar 19,05 persen, kemudian pada tahun 2018 menjadi 20,82 persen dan pada tahun 2019 turun sedikit menjadi 20,36 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.3 dibawah ini:

Tabel 5.3. Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama Tahun 2017 – 2019

Lapangan Pekerjaan Utama	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(3)
Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	2,26	1,34	1,88
Industri Pengolahan	35,16	36,03	36,47
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	30,81	29,52	31,14
Jasa-jasa	12,72	12,29	10,14
Lainnya	19,05	20,82	20,36

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka 2018-2020, diolah

Pada seluruh Lapangan Usaha atau Sektor terdapat peningkatan penduduk yang bekerja, kecuali pada Sektor jasa-jasa dan lainnya. Sektor jasa-jasa meliputi lapangan usaha pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air, bangunan dan angkutan, pergudangan dan komunikasi. Sedangkan sektor lainnya meliputi lapangan usaha Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan serta Jasa kemasyarakatan, soial dan perorangan.

# BAB VI

PERUMAHAN

# BAB VI PERUMAHAN

Sebagai salah satu kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia, rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung saja tetapi juga sebagai tempat tinggal. Karena itu aspek kesehatan dan kenyamanan dan bahkan estetika bagi sekelompok masyarakat tertentu sangat menentukan dalam pemilihan rumah tinggal dan ini berkait dengan tingkat kesejahteraan penghuninya.

Sebagai salah satu kebutuhan dasar, fungsi rumah bukan hanya sebagai tempat berteduh atau berlindung saja, akan tetapi merupakan cerminan kehidupan penduduk. Oleh sebab itu, penduduk memerlukan rumah sehat yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman.

# 6.1. Penguasaan Tempat Tinggal

Salah satu indikator kesejahteraan penduduk pada bidang perumahan adalah penguasaan tempat tinggal. Semakin banyak penduduk yang memiliki rumah sendiri, berarti semakin banyak penduduk yang mapan dan sejahtera dalam kehidupan sehariharinya.

Pada Tabel 6.1 dibawah ini dapat diketahui bahwa di Kota Pekalongan penguasaan bangunan tempat tinggal yang merupakan milik sendiri mengalami penurunan jumlah pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 namun mengalami peningkatan kembali pada tahun 2019. Pada tahun 2017 sebanyak 71,46 persen, turun menjadi 68,82 persen pada tahun 2018 dan naik kembali menjadi 72,07 persen pada tahun 2019. Pemakaian tempat tinggal bebas sewa mengalami kenaikan dari tahun 2017 ke tahun 2018 semula 21,58 persen menjadi 26,02 persen, dan pada tahun 2019 turun menjadi 22,65 persen. Untuk pemakaian bangunan dinas dan lainnya mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai tahun 2019.

Tabel 6.1. Persentase Rumahtangga Menurut Penguasaan Bangunan Tahun 2017 - 2019

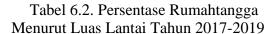
Status Penguasaan Bangunan	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Milik Sendiri	71,46	68,82	72,07
Kontrak	4,55	3,92	5,27
Bebas sewa	21,58	26,02	22,65
Dinas	1,65	0,65	0,00
Lainnya	0,75	0,60	0,00

Sumber: Statistik Sosial dan Kependudukan Jawa Tengah Hasil Susenas 2017-2019

## 6.2. Luas Lantai

Luas rumah merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan rumahtangga. Idealnya sebuah rumahtangga menempati rumah dengan luas lantai minimal delapan kali jumlah anggota rumahtangga yang menempatinya. Hal ini merupakan salah satu syarat terpenuhinya kriteria sebuah rumahtangga untuk dapat dikategorikan dalam golongan keluarga sejahtera.

Rata-rata anggota rumahtangga di Kota Pekalongan pada tahun 2018 adalah sebanyak 4 orang, dengan demikian semestinya sebuah rumahtangga menempati rumah dengan luas minimal 20 m², untuk dapat dikategorikan sebagai salah satu kriteria rumah layak huni. Pada Tabel 6.2. dibawah ini memperlihatkan bahwa rumahtangga yang menempati rumah dengan luas lantai kurang dari 20 m² masih berfluktuatif hingga tahun 2018 ini berarti masih ada rumah tangga di Kota Pekalongan yang belum menempati rumah layak huni.



Luas Lantai (M <sup>2</sup> )	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
< 20	1,73	1,30	1,85
20-49	17,19	17,11	15,28
50-99	49,24	45,13	45,70
100-149	16,02	20,17	17,94
150 +	15,82	16,29	19,23

Sumber: Statistik Sosial dan Kependudukan Jawa Tengah Hasil Susenas 2017-2019

Rumahtangga yang menempati bangunan tempat tinggal dengan luas lantai 20 - 49 m² pada tahun 2017 sebesar 17,19 persen dan pada tahun 2018 sebesar 17,11 persen sedangkan pada tahun 2019 sebesar 15,28 persen. Rumahtangga yang menempati bangunan tempat tinggal dengan luas lantai 50 - 99 m² mengalami peningkatan sedikit pada tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya yaitu semula 45,13 persen menjadi 45,70 persen. Namun pada rumahtangga yang menempati bangunan tempat tinggal dengan luas lantai 100-149 m² mengalami kenaikan pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 namun mengalami penurunan kembali pada tahun 2019. Begitu pula untuk rumahtangga yang menempati bangunan tempat tinggal dengan luas lebih dari 150 m² mengalami kenaikan dari tahun 2017 hingga 2019.

### **6.3. Sumber Air Minum**

Air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi, karenanya sumber air minum menjadi penting artinya bagi pemenuhan kebutuhan rumahtangga, hal ini berarti terpenuhinya salah satu unsur kesejahteraan. Secara umum, masyarakat Kota Pekalongan sudah menggunakan air yang cukup layak. Secara rinci pada Tabel 6.3 dibawah ini, menggambarkan rumahtangga yang menggunakan air minum berdasarkan sumbernya.

Tabel 6.3. Persentase Rumahtangga Menurut Sumber Air Minum Tahun 2017-2019

Sumber Air Minum	2017(%)	2018(%)	2019(%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Air kemasan bermerk	1,70	3,55	3,73
Air isi ulang	5,89	8,73	8,90
Ledeng	38,10	32,98	32,34
Sumur bor/pompa	21,53	23,55	21,98
Sumur terlindung	30,07	29,58	30,44
Sumur tak terlindung	2,72	1,61	2,51
lainnya	0,00	0,00	0,00

Sumber: Statistik Sosial dan Kependudukan Jawa Tengah Hasil Susenas 2017-2019

Rumahtangga pengguna air ledeng sudah mendominasi, yaitu pada tahun 2017 mencapai 38,10 persen, kemudian pada tahun 2017 menjadi 32,98 persen, sedangkan pada tahun 2019 berkurang menjadi sebesar 32,34 persen. Selanjutnya adalah rumahtangga yang menggunakan sumur terlindung pada tahun 2017 sebanyak 30,07 persen, kemudian pada tahun 2018 sebanyak 29,58 persen, dan pada tahun 2019 menjadi 30,44 persen. Rumahtangga yang menggunakan sumur pompa/bor pada tahun 2017 sebanyak sebesar 21,53 persen, kemudian pada tahun 2018 sebesar 23,55 persen dan pada tahun 2019 sebesar 21,98 persen. Rumahtangga pengguna air kemasan pada tahun 2017 sebesar 1,70 persen, lalu pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 3,55 persen, dan pada tahun 2019 juga meningkat menjadi sebesar 3,73 persen. Disisi lain masih ada rumahtangga yang menggunakan sumur tak terlindung, walau hanya sebanyak 2,72 persen pada tahun 2017 kemudian pada tahun 2018 berkurang menjadi 1,61 persen dan pada tahun 2019 menjadi sebesar 2,51 persen.

Kemudian, apabila ditinjau dari sudut kesehatan, mata air yang digunakan sebagai sumber air minum seharusnya mempunyai jarak minimal 10 m dari tempat penampungan tinja terdekat. Namun demikian tidak semua rumahtangga pengguna air tanah sebagai air minum dapat memenuhi syarat kesehatan tersebut dengan berbagai sebab. Tabel 6.4 dibawah ini mencatat jarak sumber air minum yang digunakan dengan penampungan tinja di Kota Pekalongan pada tahun 2017-2019.

Tabel 6.4. Persentase Rumahtangga Menurut Jarak Sumber Air Minum ke Penampungan Tinja Tahun 2017-2019

Jarak	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
<10 m	51,32	49,96	48,85
>=10 m	45,99	42,44	46,80
Tidak Tahu	2,69	7,60	4,35

Sumber : Statistik Sosial dan Kependudukan Jawa Tengah Hasil Susenas 2017-2019

Rumahtangga di Kota Pekalongan yang menggunakan air tanah sebagai sumber air minum, yaitu sumur bor/pompa dan sumur terlindung serta sumur tak terlindung, yang tidak memenuhi syarat, yaitu yang jaraknya dari sumber air minum dengan tempat penampungan kotoran/tinja kurang dari 10 meter jumlahnya menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2017 seebsar 51,32 persen, kemudian pada tahun 2018 turun menjadi 49,96 persen dan pada tahun 2019 juga turun menjadi 48,85 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin meningkat kesadaran masyarakat dalam membangun sumber air minum yang menggunakan air tanah sesuai standar kesehatan.

Sedangkan persentase rumahtangga di Kota Pekalongan yang jarak sumber air minum ke penampungan tinja lebih dari 10 meter mengalami penurunan pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 namun mengalami peningkatan pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018. Pada tahun 2017 sebesar 45,99 persen, turun menjadi 42,44 persen pada tahun 2018, dan meningkat pada tahun 2019 menjadi sebesar 46,80 persen. Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya

membangun sumber air minum dengan jarak terhadap penampungan tinja lebih dari 10 meter.

Rumahtangga yang tidak tahu berapa jarak sumber air minumnya dengan penampungan tinja terdekat mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 sebesar 2,69 persen, kemudian pada tahun 2018 sebesar 7,60 persen, dan pada tahun 2019 turun menjadi 4,35 persen.

# BAB VII INDIKATOR LAINNYA

# BAB VII INDIKATOR LAINNYA

Selain indikator-indikator yang telah dipaparkan di depan, masih ada beberapa indikator sosial lain yang juga ikut menunjang tercapainya tingkat kesejahteraan penduduk. Diantara indikator-indikator sosial tersebut adalah perekonomian rumahtangga yang dalam hal ini dilihat dari pengeluarannya.

# 7.1. Pengeluaran Rumahtangga dan Banyaknya Tempat Ibadah

Tingkat penghasilan masyarakat di suatu wilayah dapat digunakan sebagai ukuran kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Namun demikian sampai sejauh ini data mengenai pendapatan amat sulit didapat, terutama dalam hal keakuratan data. Oleh sebab itu, untuk mengetahui tingkat pendapatan masyarakat digunakan pendekatan pengeluaran rumahtangga, seperti terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 7.1. Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran Tahun 2019 (Rupiah)

Kelompok Komoditas		Kelompok Pengeluaran			
		40 Persen Terbawah	40 Persen Tengah	20 Persen Teratas	Rata-rata
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Padi-padian	48 518	52 260	56 735	51 657
2.	Umbi-umbian	1 299	2 549	4 339	2 407
3.	Ikan/udang/ cumi/kerang	20 643	25 979	43 097	27 267
4.	Daging	13 834	22 584	44 947	23 554
5.	Telur dan susu	17 372	24 436	45 851	25 892
6.	Sayur-sayuran	22 125	28 418	39 568	28 129
7.	Kacang-kacangan	7 049	9 977	12 368	9 283
8.	Buah-buahan	9 688	22 384	54 989	23 824
9.	Minyak dan kelapa	6 045	8 719	12 401	8 385

Kelompok Komoditas		Kelompok Pengeluaran			
		40 Persen Terbawah	40 Persen Tengah	20 Persen Teratas	Rata-rata
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Bahan minuman	10 503	15 212	20 464	14 377
11	Bumbu-bumbuan	7 564	8 779	13 758	9 289
12	Konsumsi lainnya	5 704	9 226	11 045	8 180
13	Makanan dan minuman jadi	140 944	242 307	391 319	231 532
14	Rokok dan tembakau	22 535	53 413	69 773	44 322
	Jumlah Makanan	333 824	526 243	820 655	508 098
15	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	121 941	244 011	585 708	263 494
16	Aneka barang dan jasa	48 877	93 558	304 237	117 817
17	Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	15 681	33 795	62 490	32 283
18	Barang tahan lama	7 411	32 878	126 118	41 335
19	Pajak, pungutan, dan asuransi	13 863	25 573	67 844	29 341
20	Keperluan pesta dan upacara/kenduri	1 327	11 887	13 834	8 048
	Jumlah Bukan Makanan	209 099	441 702	1 160 230	492 317
	Jumlah Pengeluaran Kota Pekalongan	542 923	967 945	1 980 885	1 163 918

Sumber: Susenas Maret 2019

Perubahan harga-harga kebutuhan pokok rumahtangga, telah ikut mempengaruhi tingkat pengeluaran penduduk. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok pengeluaran per kapita sebulan pada 40 persen terbawah untuk makanan sebesar Rp 333.824 dan bukan makanan sebesar Rp 209.099. Kemudian, untuk rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok pengeluaran per kapita sebulan pada 40 persen tengah untuk makanan sebesar Rp 526.243 dan bukan makanan sebesar Rp 441.702. Untuk rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok pengeluaran per kapita sebulan pada 20 persen teratas untuk makanan sebesar Rp 820.655 dan bukan makanan sebesar Rp 1.3160.230. Pada Tabel 7.1 diatas terlihat adanya perbedaan pola konsumsi antara

kelompok pengeluaran per kapita sebulan pada 40 persen terbawah, 40 persen tengah dan 20 persen teratas, bahwa untuk kelompok pengeluaran per kapita sebulan pada 40 persen terbawah dan pada 40 persen tengah pengeluaran untuk makanan masih lebih tinggi dibandingkan bukan makanan. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran per kapita sebulan pada 20 persen teratas pengeluaran konsumsi bukan makanan lebih besar dibandingkan makanan. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok pengeluaran per kapita sebulan pada 20 persen teratas cenderung lebih banyak mengonsumsi bukan makanan dibandingkan makanan karena tingginya penghasilan sehingga pola konsumsi berubah.

Tabel 7.2 Banyaknya Tempat Ibadah di Kota Pekalongan Tahun 2017-2019

Tempat Ibadah	Tahun			
Tompat Toutain	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	
Masjid	136	139	161	
Mushola	708	722	665	
Gereja	11	8	12	
Pure	1	1	1	
Vihara	6	6	4	
Klenteng	2	2	N.A	

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka 2018-2020

Tempat ibadah di Kota Pekalongan bisa dilihat dari tabel diatas, dari Tabel 7.2 di atas bisa diartikan bahwa penduduk kota pekalongan mayoritas muslim karena jumlah tempat ibadah seperti masjid, mushola paling banyak terdapat, sedangkan tempat ibadah lainnya relatif stabil jumlahnya, hanya vihara yang mengalami penurunan jumlahnya pada tahun 2019, sedangkan gereja mengalami kenaikan pada tahun 2019.

# BAB VIII PENUTUP

# BAB VIII PENUTUP

Kebutuhan data kesejahteraan rakyat perlu dipenuhi untuk mengetahui apakah hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama yang menyangkut berbagai aspek pemenuhan kebutuhan dasar hidup seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, keamanan dan kesempatan kerja dalam berbagai bidang.

Beberapa indikator seperti kependudukan dan keluarga berencana, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan dan indikator lainnya yang ada di Kota Pekalongan menunjukkan bahwa hasil-hasil pembangunan ada yang telah cukup banyak dirasakan manfaatnya terutama pada indikator ketenagakerjaan, yaitu penurunan tingkat pengangguran terbuka. Untuk itu program pembangunan yang telah dicanangkan sesuai visi dan misi pembangunan Kota Pekalongan sangat perlu terus dilaksanakan agar tingkat kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat.

Namun demikian yang perlu dicermati dan diperhatikan adalah tingkat pendidikan penduduk, yang merupakan sumber daya pokok untuk membangun Kota Pekalongan, yang masih harus terus diupayakan peningkatannya.

Akhirnya, tiada program pembangunan masyarakat yang berhasil dan tepat guna oleh Pemerintah bila tanpa mendekatkan dan melibatkan masyarakat secara langsung.

